

## HUTAN : SATU TEMPAT, BERAGAM SUDUT PANDANG

(Suatu Analisis Komponen Ekologi, Sosial, Ekonomi dan Budaya Hutan Hatunuru Dalam *Framework* Pembangunan Negeri Hatunuru Pasca-Resistensi)

**Jobberth Tupan**

Program Pascasarjana Magister Studi Pembangunan  
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga  
[jobberhtupan@gmail.com](mailto:jobberhtupan@gmail.com)

### **Abstract**

Industrial approach by parties outside the community is often a problem for people in the community who still up hold the values of regionalism. Decentralization deemed incapable to answer needs of the community, and even alienating society. Local governments often decentralized approach to promote industrial development vision and mission of each region. It then presents the resistance of society as happened in the village Hatunuru. Hatunuru public notice that the palm oil industries which are negotiated by the Regents of Western Seram and investors will have an impact on the degradation values of ecological, social, cultural and economic, and a landing people in poverty. With the help of formal and informal organizations, communities and then find the true meaning of development, and wants development without losing sight of the forest as the utility sentrum community life. Therefore, the idea of bottom-up development should be considered in order to develop rural Hatunuru rural in the stage of development of post-resistance.

**Kata Kunci :** Hutan, Perlawanan, Pasca-Resistensi, Nilai-Nilai Lokal, Konsep Pembangunan Ideal

### **Pendahuluan**

Sebagaimana diketahui, Maluku pada tahun 2014 silam mengalami pergolakan seputar isu pembangunan lewat kolaborasi kapitalis dan elit-elit lokal. Indikasi degradasi lingkungan, perampasan hak-hak ulayat, keteralienasian perekonomian hingga diskriminasi budaya menjadi alasan utama masyarakat lokal dan lembaga-lembaga sosial-keagamaan melakukan protes yang bermuara pada resistensi dalam wajah gerakan sosial. Seperti

yang terjadi pada salah satu domain di Maluku yakni negeri Hatunuru, dimana elit pemerintahan dalam hal ini Bupati Seram Bagian Barat (SBB) membolehkan atau secara leluasa memberikan jaminan kepada investor kelapa sawit untuk mengeksplorasi kemudian berniat mengeksploitasi hutan milik masyarakat Hatunuru tanpa ada proses negosiasi maupun pengambilan keputusan oleh masyarakat lokal. Coase (dalam Rogers, et al, 2008) menilai bahwa internalisasi adalah bagaimana masyarakat yang akan terkena dampak (negatif atau positif) oleh perusahaan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tulisan yang sama, Coase melihat bahwa insentif oleh perusahaan kepada masyarakat lokal adalah sangat penting.

Hutan Pulau Seram tengah terintimidasi oleh praktek-praktek oppurtunistis para elit maupun investor. Masyarakat Hatunuru adalah corak masyarakat pesisir yang memberlakukan sistem pertanian dengan mengandalkan hutan. Hutan bagi masyarakat Hatunuru adalah sebagai “dapur” Hatunuru, karena menurut mereka, segala sesuatu telah tersedia di hutan untuk disajikan kepada mereka. Hal ini jelas sangat kontradiksi dengan kebijakan Bupati lewat pendekatan kelapa sawit yang notabene sebagai salah satu industri dengan potensi mencederai kearifan lokal, lebih daripada itu mampu mendegradasi lingkungan, mengkontaminasi atau bahkan menyerap kadar air sehingga kekeringan akan berdampak pada kemiskinan endemik negeri Hatunuru.

Secara substansial, pendekatan industrial memang mampu mewujudkan perubahan, namun perubahan tidak dapat mensejahterakan masyarakat yang masih terkungkung dalam kearifan lokal. Hal ini dikatakan Noerberg-Hoedje dan Goering (dalam Litaay, 2014) bahwa pendekatan industrial bukan merupakan solusi melainkan wajah baru dari masalah. Pendekatan industrial kerap menyulut perlawanan akar rumput. Hal ini berlaku pada masyarakat Hatunuru yang dengan bantuan pihak-pihak terampil lewat organisasi intra Gereja Protestan Maluku (GPM) yakni, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AM-GPM) dan Mahasiswa Makina-Uli (MAULI) yang saat itu melakukan gerakan perlawanan kolektif atas dasar; (1) hutan merupakan komponen penting masyarakat, selain sebagai sentra mata pencaharian lokal, juga sebagai wadah dalam ritual adat, dan juga merupakan wilayah yang dalam kosmologi masyarakat Hatunuru bersentuhan langsung dengan hal-hal yang bersifat *transcendental*; (2) kultur bertani masyarakat adalah corak bertani layaknya petani hutan lainnya di Maluku; (3) kekecewaan masyarakat karena tidak dilibatkan dalam proses

pengambilan keputusan. Ketiga alasan ini adalah pernyataan mendasar mengapa masyarakat Hatunuru lalu kemudian melakukan perlawanan.

Semestinya lewat era desentralisasi, Bupati SBB harus mampu memahami kebutuhan lalu kemudian memproyeksikan pembangunan yang relevan bagi daerahnya tanpa mengabaikan keberagaman kekayaan alam pada sektor kehutanan, bukan malah bertindak sebagai *rent seeker* maupun *broker*. Terlebih lagi, ketika hutan sebagai aset kehidupan masyarakat guna menjaga kestabilan manusia sebagai bagian dari alam ini tengah terintimidasi akibat kepentingan diri sendiri. Hal ini dikatakan oleh Kameo sebagai ketamakan manusia (*human greed*)<sup>1</sup>. Situasi ini digambarkan oleh penulis dengan kalimat ; “lebih baik menjadi miskin untuk memperkaya orang lain, daripada menjadi kaya tetapi memiskinkan orang lain”.

Artikel ini hendak memaparkan hasil penelitian di negeri Hatunuru Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Fokus penelitian ini adalah bagaimana melihat hutan sebagai komponen terpenting masyarakat Hatunuru sehingga melakukan gerakan perlawanan kolektif.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil tempat di negeri Hatunuru. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih tiga bulan, terhitung dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data secara *voluntary*. Alasan mengapa penulis menggunakan teknik ini dalam rangka pengumpulan data; (1) masyarakat Hatunuru pada saat itu terbagi menjadi dua kubuh (pro-hegemoni dan kontra hegemoni); (2) ketakutan penulis akan konflik lanjutan antar dua kubuh akibat proses penelitian ini; (3) mencegah terjadinya kesenjangan elit dan GPM. Dengan demikian, ketika proses wawancara mendalam dilakukan, penulis mengajukan pertanyaan apakah bersedia untuk diwawancarai ataukah tidak, jika tidak maka wawancara tidak dilakukan. Selibhnya, hasil observasi dilakukan demi memperkuat keabsahan data. Tantangan penelitian ini datang dari pihak elit yang menghubungi penulis lewat telepon selular untuk membatalkan proses penelitian, karena peneliti tidak menempuh jalur

---

<sup>1</sup>Kalimat ini pertama kali didengar oleh penulis pada saat itu tengah berpartisipasi sebagai mahasiswa Prof. D. Kameo, ketika berada dalam proses perkuliahan, mata kuliah *Sustainable Development*.

pemerintahan tetapi memilih melalui jalur gereja atas bantuan beberapa senior penulis yang saat itu tengah menggumuli tugas sebagai *Vicaris* dan Ketua Majelis Jemaat. Namun, ketakutan penulis dalam rangka memberhentikan proses penelitian teragalkan lewat anjuran Ketua Klasis Taniwel yang memberi kepercayaan penuh pada penulis untuk melanjutkan penelitian, dan selebihnya Ketua Klasis Taniwel yang akan bertanggung jawab terhadap Pemerintah SBB.

Analisis data dilakukan dengan menempuh teknik analisis komponensial, dimana komponen-komponen penting diangkat untuk dibahas satu persatu demi melihat mengapa perlawanan terjadi dan kemudian melihat konsep pembangunan seperti apa yang sangat ideal bagi negeri Hatunuru dalam tahap perkembangan pasca konflik.

### **Hutan Sebagai Konstruksi Identitas Masyarakat Hatunuru**

Masyarakat Hatunuru merupakan masyarakat yang memiliki keunikan tersendiri, dan berbeda dari masyarakat pulau Seram secara lazim. Keunikan tersebut bertolak dari pengamatan penulis sebagai berikut; (1) masyarakat Hatunuru merupakan masyarakat bertipologi petani hutan, namun secara domain, mereka adalah masyarakat pesisir; (2) masyarakat Hatunuru bukan berasal dari satu suku seperti hal masyarakat lainnya pada wilayah Taniwel Timur, mereka berasal dari dua suku (*Wemale dan Alune*<sup>2</sup>); (3) kendati berada pada wilayah pesisir, masyarakat Hatunuru tidak sekalipun bersentuhan dengan sektor kelautan sebagai penunjang perekonomian dalam hal produksi, konsumsi dan distribusi; (4) sentrum masyarakat Hatunuru adalah hutan, sebagai *livelihood*, wadah nilai-nilai religio-kosmis dan nilai-nilai sosial dalam proses sosial semisal *masohi*<sup>3</sup>. Dengan demikian, hutan bagi masyarakat Hatunuru merupakan salah satu komponen ideal dalam pembangunan aras lokal. Pembangunan aras lokal bukan sebuah visi dalam mewujudkan pembangunan fisik dengan sentuhan otoritas pemerintah lewat desentralisasi, melainkan pembangunan yang berkapabilitas demi dan untuk masyarakat Hatunuru secara tradisional. Hal ini menjadikan hutan sebagai sumber finansial (*financial resource*), ketahanan pangan (*food safety*), menyimpan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan sebagai lahan pertanian (*agricultural land*).

---

<sup>2</sup>Wemale dan Alune adalah salah satu suku besar yang dalam mitologi pulau Seram berasal dari Kerajaan Nunusaku

<sup>3</sup>Masohi adalah nama lain dari kerja bersama atau gotong-royong dalam dialek Maluku.

Kecenderungan masyarakat Hatunuru sebagai masyarakat hutan sejatinya berakar pada eksistensi dua suku yakni Wemale dan Alune yang hidup sebagai masyarakat. Orang atau suku Wemale dan Alune kendati telah mengalami perubahan dan mampu beradaptasi dalam perubahan baik lewat interaksi sosial dan sudah hidup lama pada wilayah pesisir, namun dependensi terhadap hutan masih sangat kuat dan melekat dalam jati diri mereka (suku Wemale dan Alune) (Pelupessy, 2012; 80-85). Hal ini memang merupakan sebuah realitas empiris yang oleh penulis dielaborasi kemudian dikonotasikan (sesuai interpretasi masyarakat Hatunuru) bahwa hutan merupakan wadah signifikan sebagai konstruksi identitas masyarakat Hatunuru.

Konstruksi identitas mengakibatkan masyarakat terkungkung pada sebuah corak identitas *defensive*. Sebagaimana dikemukakan Filimon, et al (2014), mengenai identitas *defensive* berakar pada ketergantungan (*dependency*), kemudian menurunkan (*decline*) efektifitas yang berakibat kebuntuan (*impasse*). Fillimon, et al (2014) juga melihat warisan sebagai identitas *territorial*. Selebih jauh daripada itu, Chevallier (2002) menggunakan kata warisan sebagai aset yang membantu masyarakat untuk hidup. Kecenderungan masyarakat Seram terkategori masyarakat terisolasi bukan karena masyarakat tidak mampu membuka diri ke jalur perubahan, tetapi sebaliknya masyarakat memiliki batasan-batasan wilayah yang kemudian dipandang sebagai *territorial*. Keterisolasian pada konteks masyarakat Seram bukan secara struktural maupun kultural tetapi lebih kepada *territorial*.

Penulis melihat ketakutan masyarakat akan pamali sebagai sebuah pelajaran yang berlatar belakang historis dalam kaitannya dengan tradisi lisan yang tertuturkan secara bergenerasi terkait asal-muasal Danau Tapala. Danau Tapala merupakan salah satu danau yang memiliki luas 10ha, terbentang luas diantara hamparan pohon-pohon sagu dan gunung. Menurut salah seorang responden (Mikhel Latualia, tokoh adat negeri Hatunuru), pada zaman dahulu Danau Tapala merupakan negeri Hatunuru yang kemudian tenggelam karena orang luar yang datang sebagai pengintai. Hal ini tidak terlepas dari eksistensi masyarakat Hatunuru pada masa lalu yang sangat lihai dalam berperang antar kerajaan ortodoks di pulau Seram. Oleh karena itu, salah satu negeri pada zaman itu mengirimkan dua orang pengintai untuk mengeksplorasi negeri Hatunuru, namun kedua pengintai tersebut malah mencuri benda pusaka negeri dan menggunakan panah untuk memanah ayam berwarna putih yang oleh masyarakat dianggap pamali. Hal ini lantas

mengakibatkan negeri Hatunuru tenggelam dan kemudian menjadi Danau Tapala hingga saat ini.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa identitas pertahanan masyarakat bukan hanya sekedar pada *territorial* semata melainkan ketakutan akan pamali. Sebagaimana diketahui oleh penulis bahwa masyarakat Hatunuru menolak proyek kelapa sawit merupakan sebuah tindakan yang lahir akibat pengaruh ideologi lokal. Ideologi lokal hadir sebagai legitimasi masyarakat yang relevan dengan sejarah Danau Tapala, bahwa orang dagang (orang luar) tidak harus menguasai hutan masyarakat ataupun mempengaruhi masyarakat akan pembangunan lewat pendekatan industrial karena mereka takut akan kutukan sebagaimana terjadi pada masa lalu. Hal ini dikatakan Chambers (1983) terkait pandangan kontradiktif pihak luar komunitas menisbatkan masyarakat berada pada jalur kemiskinan.

### **Potret Petani Hutan Wilayah Pesisir**

Ketergantungan masyarakat akan SDA alam hutan mengarahkan masyarakat Hatunuru kontemporer sebagai petani hutan. Secara totalitas masyarakat Hatunuru adalah masyarakat petani hutan, kendati mereka (masyarakat Hatunuru) memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Swasta (PNS), namun hal ini tidak kemudian mengganggu peran masyarakat untuk tetap menekuni aktifitas bertani pada wilayah hutan. Petani hutan dalam corak masyarakat Hatunuru kemudian terbagi menjadi dua berdasarkan hak kepemilikan lahan; (1) petani hutan murni; (2) petani kebun. Petani hutan murni merupakan representasi masyarakat Hatunuru pemilik lahan atau tuan tanah. Dalam struktur adat, tipe petani hutan murni merupakan masyarakat yang tergolong bangsawan suku Wemale dan Alune atau dalam dialek Maluku merupakan keturunan raja. Sedangkan petani kebun merupakan masyarakat yang dalam struktur adat tergolong masyarakat kelas bawah atau masyarakat atau menengah. Hal ini juga berlaku terhadap para pendatang atau disebut “orang dagang” yang telah lama berinteraksi dan hidup di dalam negeri Hatunuru. Kecenderungan masyarakat sebagai tuan tanah memberikan tanah untuk mengusahakan keberlanjutan hidup bagi masyarakat kelas menengah, bawah maupun pendatang menggambarkan masyarakat Hatunuru hidup dalam soloidaritas. Sebagaimana dikemukakan Durkheim (dalam Lattu, 2014; 235) bahwa “solidaritas sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*)”.

Petani hutan murni kemudian terbagi menjadi dua tipe petani berdasarkan jenisnya. Pertama petani hutan murni sebagai tuan tanah atau merupakan petani kapitalis. Kedua, petani hutan sewaan atau petani yang diberikan kepercayaan untuk mengelolah pertanian milik petani kapitalis. Realitas ini disebutkan Durkheim (dalam Lattu, 2014) sebagai solidaritas organik dan mekanik. Etos pembagian kerja (solidaritas organik) bukan menggantikan solidaritas mekanik yang secara hakiki merupakan panduan masyarakat akan kesadaran lewat kesamaan (Durkheim), tetapi oleh penulis lebih kepada pembagian kerja merupakan hal yang timbul atas kesadaran akan kesamaan sebagai petani hutan. Hal ini memainkan sebuah gagasan baru bahwa, masyarakat Hatunuru tersistematis lewat solidaritas organik dalam pembagian kerja yang secara esensial lahir atas dasar kesamaan atau solidaritas mekanik. Dalam kehidupan ini praktek kolonisasi dalam hidup corak petani hutan sebagai kapitalis terminimalisir atas kesadaran hutan merupakan milik bersama atau hutan merupakan barang publik (*public good*).

Hutan sebagai barang publik adalah pandangan yang muncul secara tradisional atas kesadaran warisan leluhur yang mesti dibagikan untuk dinikmati bersama. Hal ini dikemukakan Hadikusuma (1992) sebagai pembagian warisan secara kolektif. Sistem ini mengharuskan para alih waris untuk tidak menggunakan warisan secara pribadi, melainkan warisan dipandang sebagai milik bersama. Dengan demikian, ketika masyarakat sebagai petani sewaan dipekerjakan, solidaritas menjadi titik tolak petani kapitalis untuk tidak kemudian menawarkan pengupahan lewat harga nominal rupiah sebagai insentif atau gaji, tetapi lebih kepada pemberian hasil-hasil pertanian yang dibagikan sesuai pola 60-40, 60% untuk petani kapitalis dan 40% untuk petani sewaan.

Meskipun secara internal kehidupan sosial masyarakat Hatunuru sebagai petani hutan bersumber pada solidaritas, namun kehidupan perekonomian masyarakat jauh dari kata keberlanjutan. Hasil-hasil produksi pertanian lokal selebihnya hanya menjadi hidangan di atas meja makan. Hal ini terjadi akibat; (1) pasar dibangun secara swadaya; (2) barang publik; (3) infrastruktur. *Pertama*, pasar yang dibangun secara swadaya adalah sebagai wadah distribusi barang guna meminimalisir ketersediaan barang yang melimpah, selain daripada itu, hal ini juga sebagai sumber pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga seperti; pendidikan anak, biaya kesehatan dan sumbangan tetap bagi gereja dan negeri. Ironisnya, ketidakefisien pasar ini adalah hanya berlaku atau hanya terfungsikan selama kurang lebih satu

sampai dua jam, hal ini dikarenakan, pasar yang dibangun secara swadaya ini menggunakan fasilitas transportasi atau proses transaksional ini dilakukan pada jalur utama transportasi (jalan raya), ketidakseimbangan proses pasar ini mengakibatkan masyarakat selebihnya beralih ke arah subsisten. *Kedua*, barang publik menjadi salah satu indikator kegagalan pasar, seperti halnya disebutkan Rogers, et al (2008, 278) terkait kecenderungan barang publik seperti berikut; *they involve non-excludable, non-rival consumption, they are common property resources*. Ketersediaan barang publik sebagai sumber daya bersama berimbas pada kegagalan distribusi hasil pertanian masyarakat Hatunuru, karena secara fundamental, hasil-hasil pertanian merupakan barang bersama dan tidak ada spesialisasi untuk memiliki barang tersebut karena ketiadaan persaingan masyarakat untuk memiliki barang tersebut. *Ketiga*, infrastruktur menjadi kendala masyarakat Hatunuru dalam proses distribusi hasil pertanian. Kendala ini senantiasa menjadi permasalahan sentral terkhususnya pada wilayah pulau Seram. Kerusakan jalan berdampak pada pembentukan harga setiap armada transportasi. Lima puluh ribu untuk perorangan dirasakan berat untuk dilalui oleh masyarakat Hatunuru. Ketiga hal demikian adalah sebuah fenomena masyarakat Hatunuru sebagai petani yang kerap gagal dalam memobilisasi SDA sehingga potret petani Hatunuru dikatakan oleh penulis sebagai petani semi-subsisten.

### **Hutan Sebagai Sumber Daya Ekonomi**

Kendati kerap tertumbuk pada kegagalan pasar (*market failure*), namun ideologi perekonomian masyarakat Hatunuru tetap berpatokan terhadap hutan sebagai sumber daya ekonomi (*economy resource*). Hilderbrand (dalam Arsyad, 2010; 61) berpendapat bahwa perkembangan ekonomi secara fundamental bukan pada cara produksi ataupun pada cara konsumsi, tetapi pada cara distribusi. Cara distribusi mencakup perekonomian barter. Arsyad (2010) melihat bahwa pemikiran Hilderbrand dinilai cukup baik dalam perspektif sosiologi, namun oleh Arsyad pemikiran ini kurang bermakna apabila ditinjau ke dalam perspektif ekonomi. Berdasarkan temuan empiris, proses barter sebagai sistem ekonomi ortodoks masih mencitrai kehidupan masyarakat Hatunuru. Menurut penulis, barter merupakan salah satu sistem perekonomian pasrah yang memang oleh masyarakat tradisional masih berlaku demi menginovasi kebutuhan konsumtif agar tidak selamanya mengkonsumsi produksi yang homogen. Hal ini bukan berlaku antar komunitas internal, tetapi lebih kepada komunitas



satu dengan komunitas lain, seperti hal masyarakat Hatunuru dan masyarakat negeri lainnya.

Bucher (dalam Arsyad, 2010) menilai perkembangan perekonomian akan melalui tiga tahap yakni; perekonomian subsisten, perekonomian kota dan perekonomian nasional. Bucher menjelaskan tentang bagaimana perekonomian subsisten berkembang secara meluas dan kemudian membentuk perekonomian kota, kemudian berkembang secara signifikan menjadi perekonomian nasional, dimana eksistensi pedagang menjadi semakin penting. Oleh Filimon, et al (2014), hal ini terjadi apabila masyarakat secara kolektif sadar akan inovasi, bagi Filimon, et al (2014) disebut identitas *offensive*. Identitas *offensive* mengarahkan masyarakat ke jalur pembangunan karena mampu mandiri (*autonomy*) dan mampu berinovasi (*innovation*). Gagasan ini memang menjadi gagasan setiap masyarakat Hatunuru yang menginginkan kemandirian dan berinovasi lewat produk lokal. Namun prospek cerah ini terasa sulit untuk terealisasi, pasalnya, masyarakat tidak berkapabilitas sebagai masyarakat yang mengerti tata cara perdagangan, mereka hanya terdiri dari sekelompok petani semi-subsisten, dan secara sadar hanya memberlakukan perekonomian barter dan belum mampu berinovasi karena minim keterampilan. Keterampilan lokal (*local skill*) yang dimiliki oleh setiap masyarakat adalah manifestasi pengetahuan lokal (*local knowledge*) dalam hal mengelola sagu saja seperti halnya masyarakat Maluku secara lazim.

Fluktuasi perekonomian selain karena kegagalan pasar, hal ini juga terjadi akibat tidak ada lembaga formal seperti hal Koperasi Unit Desa (KUD). Kehadiran KUD sebagai penunjang ekonomi aras desa adalah sangat penting agar SDA lewat hutan dapat tersalurkan. Ketidaksiapan pemerintah desa (raja) dalam menginspirasi kebutuhan masyarakat ke Pemerintah Kabupaten SBB adalah salah satu aspek kemiskinan politik yang oleh Fernandez (2001) dikatakan bahwa, ketiadaan akses dalam proses pengambilan keputusan termakbul sebagai kemiskinan dari segi politik. Selain daripada itu, dualisme finansial menjadi pola perekonomian dalam corak masyarakat Hatunuru. Mynt (1976) menjelaskan tentang dualisme finansial merujuk pada pasar uang NSB yang terbagi atas dua kelompok yakni, pasar uang yang terkelolah dengan baik (*organized money market*) dan pasar uang yang tidak terkelolah (*unorganized money market*). Sebagaimana diketahui oleh penulis, selain menggunakan pasar uang yang terkelolah dengan baik lewat institusi formal sejatinya seperti Bank dan Koperasi Simpan Pinjam, masyarakat juga memberlakukan sistem pasar uang

yang tidak terkelola. Dalam kaitannya dengan pemberlakuan tersebut, masyarakat Hatunuru menggunakan konsep romantisme masa lalu sebagai jalan masuk demi mendapatkan pinjaman tunai. Hal ini biasanya dilakukan kepada kerabat, para anggota dewan SBB, dan petani kaya lainnya.

Sistem perekonomian petani hutan Hatunuru masih memberlakukan barter apabila produksi kemudian melimpah dan tidak dapat terdistribusi. Selebihnya, secara finansial masyarakat Hatunuru meminta pinjaman uang dengan cara memberikan hasil pertanaian hutan kepada komunitas lain agar dapat membiayai kebutuhan rumah tangga. Corak perekonomian ini perlu diantisipasi agar tidak menjadi kebiasaan yang mendiskriminasi masyarakat akan harga diri mereka.

### **Hutan Dalam Wajah Budaya Lokal**

Budaya lokal adalah sangat penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat, dan membantu memberikan rasa identitas kepada masyarakat (Ife dan Tesoriero, 2014; 449). Berbicara tentang budaya maka secara sadar pengetahuan lokal akan menuntun keterampilan lokal didalam proses lokal. Masyarakat Hatunuru sebagai masyarakat petani hutan, memiliki budaya lokal dalam keterkaitannya dengan mengolah sagu lewat pengetahuan dan keterampilan lokal. Selain daripada itu, kesetiaan masyarakat akan lingkungan (hutan) mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki konsensus maupun konvensi yang terkreasikan oleh nilai dan norma juga keterikatan masyarakat dalam ideologi hutan dalam wajah hukum adat dan ketakutan akan pamali.

Budaya masyarakat Hatunuru adalah pengaruh budaya sukuisme atau merupakan warisan suku yang masih terus berlaku dan belum terkontaminasi oleh pengaruh budaya luar atau masih sangat masif. Hal ini terbukti lewat kesetiaan masyarakat sebagai petani yang masih memberlakukan corak hidup tradisional. Memang dibenarkan bahwa globalisasi telah berlaku dalam masyarakat lewat kemutakhiran teknologi seperti hal telepon selular, media elektronik dan lainnya, namun hal ini tidak lalu meminimalisir kepatuhan masyarakat akan budaya melainkan hal tersebut berperan sebagai kebutuhan sekunder dalam kaitannya dengan membentuk modal intelektual secara informal sebagaimana disebutkan oleh Ortiz dan Garcia (2013) bahwa, lembaga pendidikan formal bukan sebagai pembentuk modal intelektual saja, tetapi modal intelektual adalah modal

yang sadar akan kemampuan melalui bakat dan hal ini lahir lewat wajah aktivitas sekunder seperti hal ekstrakurikuler. Oleh penulis, ekstrakurikuler dipahami sebagai penunjang kapasitas berpikir masyarakat akan dunia luar mereka.

Kembali kepada pokok utama, budaya masyarakat lewat ritual-ritual adat seperti *sasi*<sup>4</sup> dan *halawane*<sup>5</sup> adalah sebuah upaya dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat guna memahami hutan sebagai identitas mereka. Bourdieu (1993) memahami struktur kognitif cenderung mencerminkan posisi struktural seseorang dalam ruang sosial (arena), oleh Bourdieu ini adalah habitus, Bloemraad (2001) menjelaskan bahwa ruang sosial yang berbeda memiliki efek yang berbeda pada tindakan kolektif.

Masyarakat Hatunuru belum mampu membuka diri bagi pembangunan lewat pendekatan industrial dari luar, sebab menurut masyarakat, terkikisnya budaya tidak dapat terhindarkan karena industri yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, kebudayaan harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan apabila industri hendak dinobatkan oleh Bupati SBB.

### **Hutan Adalah Alasan Kami Melakukan Perlawanan**

Perlawanan masyarakat Hatunuru didasari atas kebijakan Bupati SBB dan investor dalam rangka menjadikan wilayah Taniwel Timur sebagai wilayah industri kelapa sawit. Kesepakatan sepihak tanpa keterlibatan masyarakat Hatunuru sebagai pemilik tanah menghantarkan masyarakat kearah perlawanan. Puncak amarah masyarakat adalah ketika Camat Taniwel Timur melayangkan perkataan bahwa proyek yang akan direalisasikan menggunakan lahan bekas perusahaan milik keluarga

---

<sup>4</sup>Sasi merupakan larangan yang berlaku untuk mengontrol kebiasaan konsumtif masyarakat. Misalnya sasi sopi, sasi kabong, sasi hutan. Hal ini agar perilaku menyimpang masyarakat terminimalisir. Sasi berlaku sesuai durasi yang disertakan. Sasi dilakukan dengan dua cara yakni; sasi secara adat dan sasi gereja.

<sup>5</sup>Halawane oleh masyarakat Hatunuru adalah upacara kedewasaan. Pada zaman dahulu (kerajaan ortodoks), halawane dipraktikkan dengan cara membunuh musuh kemudian kepala musuh dikorbankan sebagai salah satu atribut *baileo* (rumah adat). Dewasa ini, halawane melalui transformasi dan mencitrakan masyarakat Hatunuru yang sudah beradab. Upacara halawane adalah upacara dengan melibatkan anak-anak yang tengah mengalami kedewasaan untuk hidup selama tiga hari di hutan atau terisolasi oleh masyarakat Hatunuru, agar mampu memahami hutan sebagai tempat dalam mengusahakan hidup. (hasil observasi, pada tanggal 20 Mei 2015).

Apituley<sup>6</sup>. Namun dalam kenyataannya, lahan tersebut adalah milik masyarakat Hatunuru dan bukan milik perusahaan dimaksud. Apalagi proyek kelapa sawit yang hendak dimasukan tanpa sepengetahuan masyarakat, masyarakat baru mengetahui pada saat Camat mengatakan bahwa alat-alat berat sedang dalam perjalanan menuju lokasi untuk mengeksekusi lahan, karena sudah ada persetujuan dengan raja Hatunuru. Masyarakat lewat salah seorang tokoh adat kemudian melakukan pertemuan tertutup di kediaman tokoh tersebut.

Perlawanan yang dilakukan masyarakat Hatunuru adalah dengan saling mempengaruhi masyarakat Hatunuru lainnya dalam upaya menolak proyek tersebut. Scott (1987) menjelaskan tentang kekuatan bukan sepenuhnya milik para elit tetapi komunitas lemah sekalipun memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melawan dominasi secara diam-diam (*hidden resistance*). Kerkvliet (2009) menggunakan kata *everyday politic* sebagai representasi perlawanan petani. *Everyday politic* atau politik sehari-hari oleh Kerkvliet, cenderung memprivatisasi opini sehingga pendapat ini tidak dikomunikasikan kepada elit maupun pemodal melainkan antar sesama komunitas. Foucault (1998) menjelaskan bahwa, kekuasaan tidak selamanya berasal dari pemerintah (top-down), masyarakat akar rumput juga memiliki kekuasaan (*bottom-up*). Walker (2008) menjelaskan bahwa pola perlawanan sehari-hari menjebak masyarakat sebagai masyarakat yang bertahan, hal ini dinilai oleh Walker bahwa perlawanan sehari-hari membuat masyarakat tidak berkapabilitas untuk mengubah kondisi.

Perlawanan masyarakat Hatunuru adalah perlawanan sehari-hari karena perlawanan ini tidak terorganisir, dan selebihnya tidak terkomunikasikan secara sistemik kepada Bupati SBB, karena masyarakat tidak memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Dilematis kemudian hadir dalam benak masyarakat ketika Bupati mengiming-iming ketersediaan lapangan pekerjaan, masyarakat Hatunuru terjebak dalam dua pilihan, antara mengikuti ataukah melawan demi masa depan generasi penerus. Tetapi demi melindungi warisan yang tidak lain adalah hutan, masyarakat tetap melakukan penolakan.

---

<sup>6</sup>Sebagaimana diketahui oleh penulis bahwa, pada tahun 1996 (menurut masyarakat) pernah ada perusahaan milik keluarga Apituley yang tengah beroperasi. Namun kemudian mengalami kebangkrutan akibat kredit macet. Perusahaan ini mengolah hasil-hasil pertanian kelapa, kakao dan umbi-umbian. Hal ini menurut masyarakat adalah karena masyarakat terjebak dalam kemandekan finansial, untuk itu perusahaan dibiarkan masuk melalui negosiasi dengan masyarakat Hatunuru.

Masyarakat menolak karena memahami betul sistem kelapa sawit berdasarkan pengalaman yang tengah menimpa negeri Latea di Kabupaten Maluku Tengah. Masyarakat takut akan pamali dan tidak ingin hutan yang merupakan warisan leluhur terdegradasi akibat kepentingan elit. Ketermarginalisasi masyarakat Hatunuru kemudian tersampaikan melalui dialog kepada GPM yang saat itu lewat AM-GPM memberikan jaminan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat Hatunuru.

Ketakutan pengambil alihan hutan oleh pemodal disikapi oleh masyarakat Hatunuru lewat sasi adat. Sasi adat bertujuan demi menggagalkan proses pembangunan perusahaan kelapa sawit, hal ini merupakan kamufase masyarakat yang menolak agar tidak didakwa sebagai resistor. Berikut adalah gambar yang didapat oleh penulis yang menggambarkan wujud sasi adat;

**Gambar 1. Sasi Adat Sapalewa Batai. Bentuk perlawanan sehari-hari masyarakat Hatunuru**



*(Sumber : Elifas Tomix Maspaitella, Facebook)*

Gambar di atas menjelaskan bahwa sasi adat dilakukan agar hutan terselamatkan dari tangan kapitalis. Sasi adat sebagai bentuk perlawanan terselubung, juga merupakan jembatan dalam rangka meminta bantuan roh-roh leluhur guna merestui perlawanan mereka. Sasi adat bukan sesuatu yang kemudian bersifat magis tetapi lebih kepada keyakinan masyarakat bahwa ada kuasa-kuasa adikodrati dari Tuhan maupun leluhur untuk membantu masyarakat dalam melakukan perlawanan. Salah seorang responden

mengatakan; *Biar katong mati yang penting utang tu akang seng takore*<sup>7</sup>; artinya, biar kami mati asalkan hutan tidak tersentuh.

Namun perlawanan secara tradisional ini tidak mampu mengubah kondisi masyarakat, dan selamanya masyarakat akan terjebak dalam dinamika perlawanan secara terselubung juga tidak terorganisir. Dengan demikian, masyarakat yang sadar akan hal itu lalu kemudian dengan penuh kerendahan dan harapan meminta pihak gereja dan mahasiswa yang adalah anak negeri adat Hatunuru untuk sedapat mungkin membantu ketermarginalisasi masyarakat Hatunuru akibat himpitan logika dominasi yang melabelkan masyarakat Hatunuru sebagai masyarakat yang tidak sekuat masyarakat Hatunuru pada zaman dahulu kala. Hutan adalah alasan masyarakat Hatunuru melakukan perlawanan, hutan adalah “dapur”, hutan adalah tempat mereka melepaskan penat dengan cara minum sopi dan bertukelisasi<sup>8</sup>, hutan adalah rumah para leluhur atau tempat bersemayam roh-roh leluhur. Ketiadaan hutan adalah penghilangan jati diri mereka. Oleh karena itu, semangat *hekaleka*<sup>9</sup> tetap dikumandangkan demi dan untuk kehidupan berkelanjutan masyarakat Hatunuru.

### **Gerakan SaveNusaIna: Perlindungan Hutan Tanpa Solusi Pengembangan Hutan**

Gerakan SaveNusaIna merupakan salah satu gerakan sosial yang dibentuk oleh AM-GPM dan MAULI dalam rangka memberi perlindungan demi menyelamatkan masyarakat Hatunuru dan masyarakat lainnya dalam domain Taniwel Timur. Gerakan ini berdiri sebagai perpanjangan tangan Gerakan Save Maluku yang menitik-beratkan masalah ekologi sebagai masalah yang perlu disikapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Pendekatan industrial yang marak terjadi di Maluku tanpa melibatkan masyarakat dan tanpa AMDAL merupakan keseriusan upaya gerakan sosial dalam menginspirasi dan menginspirasi kebutuhan masyarakat.

Blumer dalam “*Four Stage of Social Movement*” (2009) menjelaskan keterlibatan tenaga terampil tahapan formalisasi. Tahapan ini dalam artikel

---

<sup>7</sup>Mengutip perkataan salah satu responden dari elemen pemuda, pada tanggal 20 Mei 2015.

<sup>8</sup>Bertukelisasi adalah kata yang tengah santer dalam dialek Maluku. Kata ini mengartikulasikan makna cerita khayalan atau semacam utopia.

<sup>9</sup>Hekaleka merupakan bahasa suku. Makna sebenarnya hekaleka adalah membunuh untuk hidup baru. Oleh penulis, makna itu dipandang sebagai membunuh praktek oportunitis Bupati SBB untuk hidup baru sesuai dengan nilai-nilai dalam kearifan lokal.

yang sama dijelaskan sebagai tahap birokratisasi. Sejalan dengan ini, tenaga terampil lewat AM-GPM dan MAULI memainkan peran sebagai tokoh inspirasional bagi masyarakat Hatunuru. Sebagaimana dijelaskan Singh (2010) tentang gerakan sosial baru (*new social movement*) pada petani India yang mampu mengangkat martabat mereka dari *peasants* menjadi *farmers*. Hal ini dikatakan oleh Singh bahwa para petani kontemporer India tidak lagi mempersoalkan masalah-masalah yang berwujud konflik, pertikaian, ketegangan antar kasta dan kelompok, namun mereka (petani India) melakukan klaim secara terbuka tentang masalah materialistik seperti gender, ekologi, hak asasi manusia, kebebasan, otonomi, kesetaraan dan keadilan sosial. Hal ini oleh Kerkvliet (2009) dikatakan sebagai *official politic*, *official politic* atau politik resmi sejatinya mendialogkan secara frontal terkait dampak-dampak yang nantinya timbul akibat proyek tersebut. Kerkvliet (2009) juga mengatakan bahwa tahap akhir apabila perlawanan tidak direspon oleh pihak yang dilawan, maka resistor secara langsung harus mengecam tindakan pihak lawan, oleh Kerkvliet hal ini dikatakan sebagai *advocacy politic*. Paradigma konflik dipersempit dalam gerakan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Touraine (dalam Singh, 2010) bahwa setiap konflik harusnya; (1) memiliki sekumpulan aktor yang terorganisir; (2) mempunyai taruhan yang bernilai; (3) adanya pergumulan dan kompetisi antarpihak yang bertentangan demi mencapai apa yang dipertaruhkan. Salah satu pokok pikiran Touraine terkait dengan konflik adalah konflik neo-komunitarisme. Konflik ini merupakan konflik yang berupaya menolak transformasi sejarah yang datang dari luar untuk merusak nilai-nilai tradisional.

Eksistensi gerakan ini sebagai gerakan terorganisir yang memiliki kumpulan aktor perlawanan berkompetensi. Hutan merupakan alasan utama mengapa gerakan kolektif ini hadir. Dialog secara frontal dilayangkan tetapi tidak direspon oleh Bupati SBB sebagai otoritas tertinggi Kabupaten SBB. Dengan demikian, gerakan ini melakukan pengecaman bahwa akan membawa masalah ini pada aras yang lebih tinggi apabila aspirasi masyarakat Hatunuru tidak disikapi dengan pembatalan proyek.

Kehadiran AM-GPM dan MAULI guna berkontribusi dalam penegakan aspirasi masyarakat Hatunuru adalah sebagai modal sosial. Cox (1995) menjelaskan tentang bagaimana modal sosial adalah seperangkat jaringan sosial, norma-norma dan kepercayaan. Fukuyama (dalam Valadbigi dan Harutyunyan, 2012) mengatakan bahwa kepercayaan berkembang melalui norma-norma timbal balik dalam keterlibatan jaringan sipil. Modal

sosial diyakini sebagai pembentuk modal intelektual dan penciptaan pengetahuan (Nahapiet dan Ghoshal, 1998; Krause, et al, 2007). Timberlake (2005) melihat peran modal sosial adalah sebagai pencapaian kedamaian, keamanan dan kesejahteraan sosial.

Gerakan SaveNusaIna merupakan *New Social Movements* atau gerakan sosial baru yang berorientasi guna menyelamatkan hutan dari tangan kapitalis. Salah satu fungsionaris yang adalah pimpinan AM-GPM mengatakan bahwa, gerakan ini didorong oleh upaya mencegah pengrusakan hutan tropis yang dalam kenyataannya telah rusak juga oleh logging sejak tahun 1972 oleh PT. Djayanti Group<sup>10</sup>. Menurut mereka kelapa sawit bukan komoditi yang tepat untuk pertanian di Maluku. Dengan demikian, fungsionaris gerakan mengambil simpati masyarakat Maluku dengan slogan bertajuk #Save Nusa Ina.

Perlawanan kolektif yang terorganisir ini adalah upaya memberantas mafia kayu dan juga menyelamatkan hutan masyarakat Hatunuru agar dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sehari sebagai petani hutan. Dengan mengedarkan selebaran-selebaran keprihatinan, dan juga memainkan perang urat saraf pada media sosial, masyarakat Hatunuru dapat terselamatkan dari imperialisme struktural Bupati SBB. Penarikan investasi oleh investor adalah keberhasilan gerakan ini. Namun sayangnya, gerakan ini hanya sebagai wadah penyelamatan hutan dan tanpa member solusi pembangunan yang tepat sebagai salah satu modal sosial yang dimiliki masyarakat Hatunuru.

### **Konsep Pembangunan Ideal (Sebuah Refleksi Empiris dan Teoritis)**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian di atas, bahwa masyarakat Hatunuru lewat kesetiaan pada hutan mereka menobatkan mereka pada masyarakat bertipologi petani hutan. Kontstruksi tata kelola hutan secara konservatif adalah demi melindungi aset kehidupan masyarakat agar berkelanjutan. Melestarikan hutan merupakan gagasan masyarakat lewat nilai, norma dan konvensi masyarakat terimplisit dalam budaya dan terungkap lewat kebiasaan-kebiasan kolektif tanpa mengabaikan semangat solidaritas mekanik yang bertransformasi menjadi solidaritas organik karena masyarakat hidup dalam dualisme sebagai masyarakat yang patuh akan budaya lokal, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan lewat ketersediaan

---

<sup>10</sup>Elifas Maspaitella, pada tanggal 29 Juli 2015 via Facebook



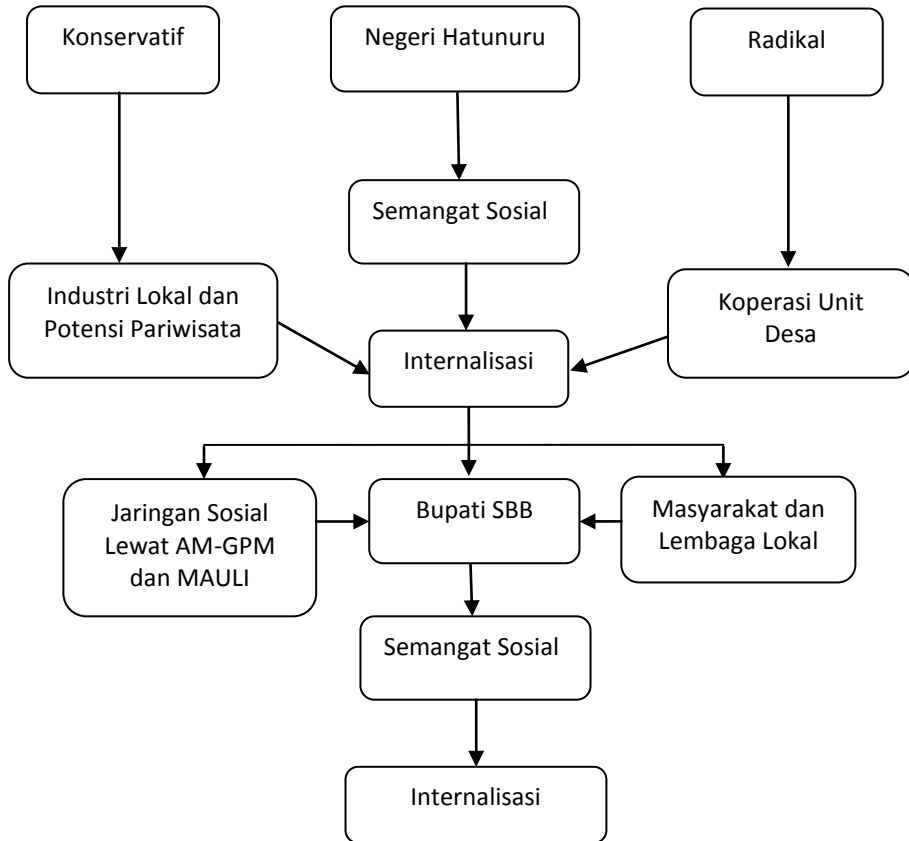
modial sosial sebagai arus perkembangan globalisasi yang memang dewasa ini tidak dapat dibendung. Dengan demikian, masyarakat Hatunuru merupakan masyarakat yang memang mampu hidup secara semi-subsisten dan barter dalam wajah perekonomian tetapi juga mampu mempertahankan budaya lewat solidaritas dan responsibilitas terhadap hutan sebagai manifestasi berteologi (eko-teologi) dan warisan leluhur.

Kendati melakukan perlawanan terhadap dominasi, tetapi masyarakat tidak lalu mengabaikan pembangunan sebagai sebuah proses perubahan multidimensi. Hal ini terbukti lewat gagasan-gagasan cerdas masyarakat Hatunuru yang menginginkan pembangunan tetapi tidak lalu mengabaikan kearifan lokal, sebagaimana kultur bertani, solidaritas dan hutan sebagai warisan leluhur. Dengan demikian, masyarakat mulai menata konsep pembangunan yang kemudian diyakini harus mampu direalisasikan demi dan untuk kesejahteraan masyarakat Hatunuru.

Ife dan Tesoriero (2014) mengatakan bahwa, pembangunan dalam aras desa semestinya menghargai pengetahuan lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, proses lokal dan kebudayaan lokal. Ketika beberapa hal ini disadari maka pembangunan dari bawah akan mewujudkan stabilitas komponen pembangunan berkelanjutan.

Sebuah gagasan pembangunan berbasis masyarakat lewat pemikiran Ife dan Tesoriero (2014), mengintroduksikan konsep perekonomian konservatif dan radikal. Oleh Ife dan Tesoriero, konservatif merupakan pembangunan yang tidak mengkesampingkan aspek kearifan lokal. Sedangkan, konsep radikal yakni upaya menemukan alternatif, yakni ekonomi berbasis lokal (Albert dan Ahnel, 1991). Konsep perekonomian konservatif dan radikal apabila dielaborasikan sebagai kesadaran pembangunan daerah-daerah yang sedang berkembang maka niscaya pembangunan dapat menemui titik berkelanjutan. Penulis melihat dua konsep ini apabila diakuisisikan dengan konteks negeri Hatunuru maka akantergambarkan pada skema berikut.

**Gambar 2. Konsep Pembangunan Negeri Hatunuru**



Skema yang tergambar diatas merupakan sebuah refleksi yang oleh penulis dilihat sebagai prospek pembangunan negeri Hatunuru.SDA yang mumpuni merupakan sebuah modal ekonomi dalam merealisasikan kerangka pembangunan di atas. Hal ini dilakukan oleh penulis bukan atas dasar kebutuhan penulis, melainkan hal ini merupakan gagasan masyarakat Hatunuru yang memiliki semangat akan pembangunan namun belum mampu mengkonsepkan pembangunan yang tidak mendegradasi nilai dalam masyarakat. Tahap internalisasi merupakan tahap dimana budaya, ekologi dan etika didialogkan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian dalam proses internalisasi, Bupati SBB, lembaga-lembaga lokal dalam wajah Tiga Batu Tungku<sup>11</sup> (TBT) dan masyarakat lokal harus berkolaborasi.

<sup>11</sup>Tiga Batu Tungku merupakan wadah yang didalamnya terdapat tiga lembaga yang ada dalam struktur negeri. Tiga lembaga tersebut terwakili oleh Pemerintah Negeri dan Staf,

Kemudian AM-GPM dan MAULI pun harus turut berpartisipasi sebagai pihak yang memiliki pengetahuan akan pembangunan sebagai komponen akademisi dan gereja dalam membangun komitmen secara bersama terkait pembangunan yang sejalan dengan konteks masyarakat Hatunuru.

Internalisasi mendesak pemerintah SBB agar mampu mewujudkan visi pembangunan yang sesungguhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan cara konservatif dan radikal. Konsep konservatif mengikutsertakan industri lokal lewat hasil-hasil alam yang mumpuni sebagaimana pala, damar, sagu, kelapa, kakao dan umbi-umbian. Kemudian, potensi pariwisata budaya mengikutsertakan Danau Tapala sebagai aset pariwisata, dan juga hutan wisata yang konservatif sebagaimana upaya perlindungan populasi burung nuri. Sedangkan, perekonomian radikal disadari sungguh sebagai salah satu penguatan perekonomian berbasis lokal dalam wajah KUD. Berangkat dari pengalaman daerah Ksar-Hellal (Tunisia) bahwa perilaku oportunistik dalam wajah industri adalah akibat kegagalan lembaga. Sebagaimana diketahui pada kasus yang sama bahwa lembaga-lembaga beralih fungsi dan memonopoli lembaga lain. Dengan demikian, penguatan spesifikasi lembaga ekonomi dalam KUD adalah bentuk radikal yang harus dimasukkan dalam pengembangan negeri Hatunuru agar tidak terjadi dualisme kepengaturan.

Hal ini membimbing penulis untuk mewujudkan salah satu konsep Tiga Batu Tungku (TBT) menjadi empat batu tungku, yang dimana gereja, pemerintah negeri dan pendidikan tidak lalu mengambil peran perekonomian karena sudah ada lembaga yang menaungi ekonomi aras desa namun belum mampu terkonsepkan secara baik dan benar oleh Pemerintah Maluku. Lembaga ekonomi aras desa dimaksudkan penulis agar tidak terjadi tumpang-tindih program pemberdayaan negeri Hatunuru, dan sedapat mungkin menjadi mobilisator pada pembangunan negeri yang memiliki SDA berkualitas namun tidak mampu terkelolah akibat ketidak-sediaan aturan perekonomian berbasis negeri Hatunuru.

## **Kesimpulan**

Era desentralisasi semestinya menjadikan masyarakat lebih berkompeten dan kemudian berkompetisi dalam mewujudkan

---

Majelis Jemaat dan Dewan Guru, hal ini pada lazimnya dijumpai pada negeri yang didominasi atau secara totalitas memeluk agama Kristen.

pembangunan negeri masing-masing. Kemandirian (*autonomy*) secara esensial akan senantiasa membimbing masyarakat pada jalan inovasi. Inovasi mengarahkan masyarakat pada arus pembangunan era globalisasi tanpa harus ada pendekatan industrial secara eksternal, karena hal ini kerap berpotensi pada perlawanan akar rumput. Geertz (dalam Arsyad, 2010) menggunakan ideology “Indonesia Luar dan Indonesia Dalam” untuk menggambarkan situasional Indonesia sebagai negara sedang berkembang. “Indonesia Dalam” merepresentasikan SDA yang mampu mengintegrasikan pendekatan industri lokal dan budaya dalam satu gagasan pembangunan, sedangkan “Indonesia Luar” dipahami sebagai pengaruh perekonomian luar akibat kegiatan seperti tambang, kelapa sawit dan lainnya.

Kehidupan masyarakat Hatunuru merupakan satu dari sedikit masyarakat yang masih hidup dalam budaya lokal meski telah terpengaruh oleh paham luar komunitas lewat arus globalisasi. Sebagaimana dikatakan Filimon, et al terkait identitas pertahanan dan identitas keterbukaan adalah dualisme identitas yang bernaung dalam masyarakat Hatunuru. Masyarakat memahami ritus (adat), hutan (ekologi), solidaritas (sosial) dan subsisten (ekonomi) sebagai sebuah tradisi yang terkandung dalam warisan budaya, dan hal ini kemudian mengindikasikan masyarakat pada jati diri *defensive*. Tetapi masyarakat juga menginginkan pembangunan yang mengandalakan sumber daya lokal, hal ini mengindikasikan masyarakat pada jati diri *offensive*.

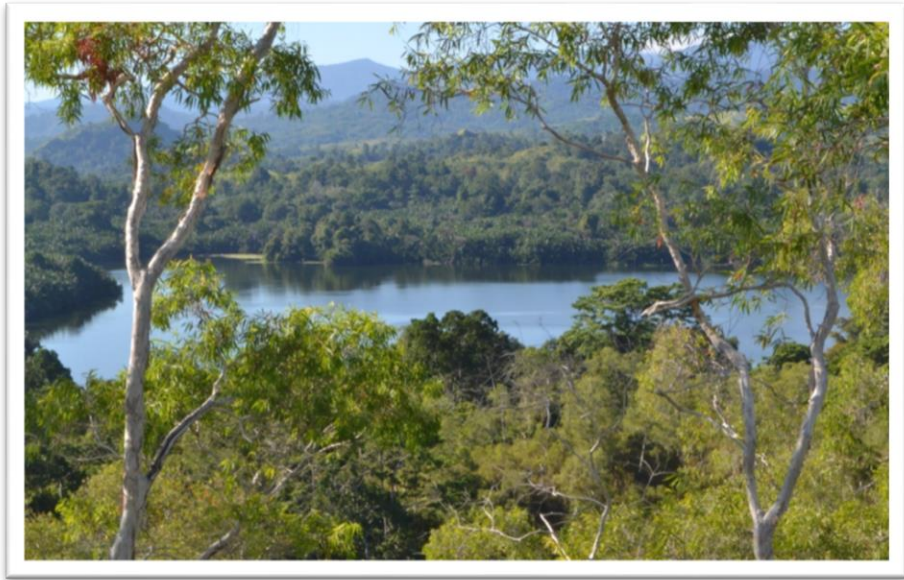
Pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat ketika mereka sadar bahwa keadaan bertahan tidak mampu mengubah kondisi. Semangat sosial adalah landasan utama masyarakat dalam menginginkan perubahan secara *bottom-up*, dan perubahan *bottom-up* membimbing masyarakat pada pembangunan yang sejati berakar pada kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian, refleksi penulis tentang dua konsep pada pembahasan sebelumnya adalah dirasakan sangat penting demi menobatkan negeri Hatunuru sebagai negeri yang tengah berkembang dalam arus globalisasi.

## Daftar Pustaka

- Alfitri., 2011. *Community Development, Teori dan Aplikasi*.  
Arsyad, Licoln., 2010. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN

- Astuti, Rini., 2013. "REED+ Sebagai Strategi-Strategi Kepengaturan dalam Tata Kelola Hutan di Indonesia: Sebuah Perspektif Foucauldian", *Jurnal Transformasi Sosial*. No. 30
- Chambers, Robert., 2013. *Rural Development : Putting The Last First*. Routledge. New York,
- Filimon, Luminita, et al., 2014. Local Development Model Based On Territorial Identity And Heritage : The Case Of Romanian "Tara"/Lands. *Revista Romana de Geografie Politica*.
- Gaaliche, Makram., 2013. Local Regulation Between Formal and Informal Institutions, Case of the Town Ksar-Hellal (Tunisia), *Eastern Journal European Studies* Vol 4.
- Hadikusuma, H, Hilman., 2011. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. C.V. Mandar Maju. Bandar Lampung, 2011
- Ife Jim, Tesoriero Frank., 2014. *Community Development : Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*
- Lattu, Izak., 2014. "Orang Tua Dari Ouw :Durkheim, Titaley dan Ritual Performance", *Nyantri Bersama John Titaley : Menakar Teks, Menilai Sejarah dan Membangun Kemanusiaan Bersama*. Satya Wacana University Press. Salatiga
- Litaay, Theofransus., 2014. "Pembangunan yang Memanusiakan Manusia", *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin "Kritis"*. Vol. XXIII (2)
- Mahmood, K., 2015. "Social Capital : From Concept to Theory", *Pakistan Journal of Science*. Vol 67 (1)
- Mari-Hussu, Hanna., 2013. "Bourdieu and Social Movements : Considering Identity Movements in Term of Field, Capital and Habitus".
- Ortiz Alcaron Domingo, Garcia Diaz Francisco Antonio., 2013. "Education Vs Intelectual Capital, Case Mexico". *Scientific e-Journal of Management Sciences*.
- Pelupessy, Pieter Jacob., 2012. *Esuriun Orang Bati* : Universitas Kristen Satya Wacana
- Rogers, P, Peter, et al., 2008. *An Introduction to Sustainable Development*.
- Schneider, Elizabeth, Alison., 2011. "What Shall We Do Without Our Lands? ; Lands Grabs and Resistance in Rural Cambodia", *Land Deals Politics Initiative*
- Singh, Rajendra., 2001. *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*
- Valadbigi, Akbar, Harutyunyan, Bagrta., 2012. "Trust. The Social Virtues and the Social Creation of Prosperity By, Francis Fukuyama". *SCS Journal*

**Lampiran:** Hutan masyarakat Hatunuru yang akan dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.



*(Dokumentasi oleh Penulis)*